

SKRIPSI MINOR

**SISTEM AKUNTANSI PEMBERIAN KREDIT PADA USAHA KECIL
DAN MENENGAH PADA PT. BANK RIAU
CABANG PEMBANTU PANAM**

Disusun Dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Tugas-Tugas
Akademik Dan Memperoleh Gelar Ahli Madya

OLEH :

RINI ANDRIANI
NIM : 00774000356



**PROGRAM DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
2010**

ABSTRAK

Oleh : Rini Andriani

Laporan ini berjudul “ Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Pada usaha kecil dan menengah pada PT . Bank Riau Cabang Pembantu Panam “

Bank adalah lembaga keuangan yang merupakan tempat masyarakat menyimpan uang dan semata-mata dilandasi kepercayaan bahwa uang akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga. Sesuai dengan fungsinya bank yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, maka usaha bank salah satunya meliputi yaitu memberikan kredit baik berupa uang maupun valuta asing.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Bank Riau Cabang Pembantu Panam melakukan pemberian kredit.

PT. Bank Riau Cabang Pembantu Panam dalam menyalurkan kredit kepada calon debiturnya harus memperhatikan prinsip 5 C tersebut sebab dengan meneliti terlebih dahulu dari prinsip 5C tadi maka Bank Riau akan dapat mengetahui siapa dan bagaimana sifat dari calon debiturnya, bagaimana kemampuannya untuk melunasi kewajiban-kewajibannya serta bentuk jaminan yang diserahkan harus sesuai dengan berapa jumlah kredit yang dipinjam oleh debitur kepada bank. Dari prinsip 5 C yang telah dilakukan penelitian, dapat diketahui bahwa dalam hal ini Bank Riau belum menetapkan standarisasi untuk menilai calon debiturnya secara tepat, namun untuk penilaian terhadap prinsip Collateral dalam hal ini Bank Riau telah menetapkan standarisasi yang bisa dibilang bagus atau tetap, sedangkan untuk prinsip Character, Capacity, Capital, dan Condition. Bank Riau memakai standarisasi secara umum belum memiliki spesifikasi semestinya, namun faktor yang menjadi tolak ukur berapa besar kredit bisa disalurkan pada calon debitur adalah factor Capital atau modal serta Surat Kelayakan Bisnis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi pemberian kredit pada usaha kecil dan menengah pada PT. Bank Riau Cabang Pembantu Panam belum berjalan efektif dan efisien.

Hal ini dilihat dari anggaran kredit pengusaha kecil dan jumlah kredit yang direalisasikan oleh PT. Bank Riau Cabang Pekanbaru Panam.

Kata kunci : Sistem Akuntansi Pemberian Kredit

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

ABSTRAK

LEMBARAN PERSETUJUAN

LEMBARAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ini.....	5
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematis penulisan	7
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	9
A. Sejarah Perusahaan.....	9
B. Struktur Organisasi.....	10
C. Aktivitas Perusahaan	17
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....	18
A. TINJAUAN TEORI	18
1. Pengertian Sistem.....	18

2. Pengertian Akuntansi	18
3. Pengertian Sistem Akuntansi	19
4. Pengertian Kredit	20
5. Unsur-Unsur Kredit.....	21
6. Fungsi Kredit.....	22
7. Jenis-jenis Kredit.....	27
8. Tujuan Pemberian Kredit	28
9. Prosedur Pemberian Kredit	29
10. Pengertian Sistem Pengendalian Intern.....	34
11. Pandangan Islam Tentang Kredit	35
B. TINJAUAN PRAKTEK.....	35
1. Jenis Kredit	35
2. Prosedur pemberian kredit	39
3. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian kredit	41
4. Pencatatan Akuntansi Pemberian Kredit.....	51
BAB IV PENUTUP	54
A. KESIMPULAN	56
B. SARAN	57

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia, pemerintah telah melaksanakan program pembangunan nasional dengan tujuan tulus menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur serta merta materil dan spiritual baik itu dalam segi ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan.

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang giatnya melaksanakan pembangunan dan harus dapat mempertahankan kestabilan ekonomi dan moneter. Kebijakan pemerintah dibidang moneter dan perbankan mempunyai peranan yang sangat penting terutama menyangkut masalah peredaran uang, persediaan serta investasi untuk meningkatkan tabungan masyarakat. Agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan dapat berhasil harus didukung oleh sumber dana, dan ini dapat dihimpun dari masyarakat berupa tabungan yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit melalui bank.

Bank adalah lembaga keuangan yang merupakan tempat masyarakat menyimpan uang dan semata-mata dilandasi kepercayaan bahwa uang akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga. Sesuai dengan fungsi bank yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, maka usaha bank salah satunya meliputi yaitu memberikan kredit baik berupa uang maupun valuta asing.

Bank pemerintah maupun bank swasta telah mengulurkan tangan untuk lebih dekat kepada masyarakat untuk membantu usahanya, terutama pada pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk kredit. Kredit adalah sebagai suatu persetujuan perjanjian pinjam meminjam uang (barang dan jasa) antara seseorang atau badan hukum dengan pihak lain yang dana pembayarannya akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Kredit dalam arti ekonomi adalah semacam pemberian modal untuk melancarkan usaha atau untuk mengembangkan usaha para pengusaha atau perusahaan. Dengan banyaknya bank memberikan bantuan modal akan sangat mendukung perkembangan dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi. Jadi keberadaan bisnis perbankan sangat memberikan arti dalam penunjang perekonomian melalui pemberian kredit pada masyarakat atau pengusaha ekonomi lemah.

Mengingat pentingnya kedudukan lembaga keuangan perbankan, maka pemerintah menyusun suatu undang-undang yang mengatur lembaga perbankan, yaitu UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 menyatakan:

1. Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan syariah yang dalam kaitannya tidak memberikan jasa lalu lintas dalam pembayaran.

Salah satu kewajiban utama bank yang dirasakan oleh setiap bank ialah melayani kebutuhan nasabah dan masyarakat, dan bank-bank mengartikan fungsi kredit dalam berbagai bentuk pinjaman investasi untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dalam usaha mengatasi kelesuhan ekonomi maka pemerintah menempuh kebijakan untuk mendorong bank-bank agar dapat mengelolah liquiditasnya dengan lebih efisien, guna lebih mampu menyediakan dana lebih besar bagi pemberian pinjaman untuk upaya meningkatkan kegiatan usaha golongan lemah terus dilakukan dengan melalui penyeragaman persyaratan kredit.

Bank boleh memberikan pinjaman kepada nasabah yang benar-benar dapat mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dari suatu kredit didapatkan dua faktor yang dapat memberikan keuntungan bagi bank. Adapun faktor tersebut adalah faktor kemampuan dan keamanan. Keamanan yang dimaksud adalah prestasi dalam bentuk uang, barang dan jasa terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan yang diharapkan menjadi kenyataan. Keuntungan yang diperoleh tersebut dalam bentuk bunga yang diterima dan diharapkan dalam pemberian kredit juga dapat mengembangkan aktivitas usaha dari kalangan usaha.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit berbagai masalah akan muncul diantaranya tujuan pemberian kredit, cara pemberian kredit, jangka waktu pemberian kredit, besarnya jumlah kredit dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Kegiatan pemberian kredit ini merupakan usaha yang didasarkan pada kepercayaan dan banyak mengandung resiko. Oleh karena itu

pengelolaannya harus dilakukan secara propesidnal dengan dibantu pengawasan internal yang ketat.

Berdasarkan pengamatan dan pandangan penulis, Bank Riau Cabang Pembantu Panam telah dapat berkembang sebagai lembaga keuangan yang dapat membantu pengusaha kecil dan menengah dalam mewujudkan usaha-usahanya. Karena hingga saat ini pengusaha-pengusaha masih membutuhkan bank untuk meningkatkan usahanya begitu juga sebaliknya pihak bank memerlukan masyarakat untuk memperoleh dana yang akan digunakan sebagai modal untuk menjalankan usahanya, sehingga keberadaan Bank Riau Cabang Pembantu Panam sebagai lembaga keuangan sangat berarti dan bermanfaat bagi masyarakat.

Berikut ini adalah data jumlah anggaran kredit pengusaha kecil dan realisasinya pada PT. Bank Riau Cabang Pembantu Panam tahun 2002 s/d 2006 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Daftar Anggaran Kredit Pengusaha Kecil dan Jumlah Kredit yang direalisasikan oleh PT. Bank Riau Cabang Pembantu Panam

Tahun	Dana Kredit untuk Pengusaha Kecil		
	Anggaran KPK	Realisasi KPK	Persentase (%)
2002	170.716.000,-	128.223.000,-	75,1 %
2003	178.826.000,-	186.374.000,-	104,2 %
2004	292.590.000,-	248.496.000,-	84,9 %
2005	573.583.000,-	382.546.000,-	71,2 %
2006	895.935.000,-	826.562.000,-	92,0 %
Jumlah	2.075.650.000,-	1.772.201.000,-	85,4%

Sumber : PT. Bank Riau Cabang Utama

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan peninjauan langsung masalah pemberian kredit pada Bank Riau Cabang Pembantu Panam dan menyajikan dalam laporan praktek

kerja lapangan dengan judul : **“SISTEM AKUNTANSI PEMBERIAN KREDIT PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA PT. BANK RIAU CABANG PEMBANTU PANAM”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “ Apakah sistem pemberian kredit pada PT. Bank Riau Cabang Pembantu Panam telah berjalan efektif dan efisien”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Bank Riau Cabang Pembantu Panam melakukan pemberian kredit.
2. Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai praktek prosedur-prosedur sistem pemberian kredit nasabah.

Kegunaan penulisan penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan mengenai sistem pemberian kredit.
2. Bagi bank, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan usahanya.
3. Sebagai referensi bagi pihak lain untuk penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Riau Cabang Pembantu Panam Jl. H.R Soebrantas Panam-Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 01 Juli sampai dengan 30 Agustus 2008.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

a. Data Primer

Adalah data yang berkenaan langsung dengan masalah yang telah dirumuskan di atas.

b. Data Skunder

Adalah data pendukung untuk memperkuat data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

a. Observasi

Adalah pengamatan secara langsung pada Bank Riau Cabang Pembantu Panam yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Adalah tanya jawab kepada narasumber di Bank Riau Cabang Pembantu Panam yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan laporan ini penulis membaginya dalam empat bab yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan laporan dan metode pengumpulan data serta sistematika pembahasan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang sejarah berdirinya dan perkembangan bank, struktur organisasi, dan aktivitas perusahaan.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Dalam bab ini menuliskan tentang tentang tinjauan teoritis dalam laporan penelitian yaitu pengertian sistem, pengertian akuntansi, pengertian sistem akuntansi, pengertian kredit, fungsi kredit, jenis kredit, unsur-unsur kredit, tujuan pemberian kredit, proses pemberian kredit, system pengendalian intern, pandangan islam tentang kredit. Sedangkan pada tinjauan praktek penulis akan membahas tentang jenis kredit pada PT. Bank Riau Cabang

Pembantu Panam, prosedur pemberian kredit, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian kredit dan pencatatan akuntansi pemberian kredit.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan berbagai saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Perusahaan

PT. Bank Pembangunan Daerah Riau yang disingkat dengan nama PT. Bank Riau merupakan kelanjutan kegiatan usaha dari PT. Baperi (PT. Bank Pembangunan Daerah Riau) yang didirikan berdasarkan akte notaris syawalsutan di atas No. BUM 9-4-45 Tanggal 12 Agustus 1961.

Selanjutnya dengan surat keputusan Gubernur KHD Tk. 1 Riau No. 51/IV. Tanggal 1 April 1996 dinyatakan berakhir semua berakhir semua kegiatan PT. Baperi. Seluruh aktiva dan pasiva PT. Baperi dilebur kedalam Bank Pembangunan Daerah Riau yang disesuaikan dengan undang-undang No. 13 tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah. Terhitung sejak tanggal 1 April 1996 secara resmi kegiatan Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai dengan satu sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah.

Dengan berbagai perubahan dan perkembangan kegiatan bank sejak tahun 1975 status pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau disesuaikan peraturan Daerah Tingkat 1 Riau tahun 1975, yang kemudian diatur kembali dengan peraturan Daerah Tingkat 1 Riau No. 18 tahun 1986 berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 1962.

Kemudian status pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau diatur dan disesuaikan dengan peraturan Daerah No. 14 tahun 1992 Jo. Peraturan Daerah yang mengatur perbankan milik pemerintah (berbadan hukum PD)

berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menegaskan bahwa dibagi dalam bentuk Bank Umum dan BPR.

Seiring dengan perkembangan kinerja usaha dan untuk mengantisipasi persaingan yang semakin kompetitif, saat ini PD Bank Pembangunan Daerah Riau diubah status badan hukumnya menjadi perseroan terbatas, berdasarkan akte notaris M. Dahad Umar, SH. No. 36 tanggal 18 Januari tahun 2003 yang telah disahkan oleh Menteri kehakiman dan hak azazi manusia dengan keputusan No. C-09851 HT 01.01 TH 2003 dan keputusan deputy gubernur Senior Bank Indonesia No. 5/30/KEP.DGS/2003 Tanggal 22 Juli Tahun 2003, Bank Pembangunan Daerah Riau, dengan nama panggilan Bank Riau.

Sampai saat ini Bank Riau terus mengalami perkembangan dan telah memiliki 20 kantor cabang, 26 cabang pembantu, 12 kantor kas dan 2 payment point, serta 2 butik Bank Riau yang tersebar diseluruh Kabupaten dan Kecamatan di Propinsi Riau dan Kepulauan Riau.

B. Struktur Organisasi Perusahaan

Sebagaimana layaknya sebuah organisasi atau perusahaan, untuk menjalankan kegiatan harus digariskan dalam suatu tugas dan wewenang. Untuk menggambarkan tugas dan wewenang serta untuk mengefektifkan kegiatan operasional diperlukan struktur organisasi. Struktur organisasi dapat dibuat sesuai dengan manajemen perusahaan.

Dalam pembangunan dan pengelolaan suatu perusahaan diperlukan struktur organisasi yang baik dan personil yang memadai. Kedua aspek manajemen ini akan sangat menentukan keberhasilan dan perkembangan suatu perusahaan.

Organisasi juga sebagai alat dari manajemen untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan dalam aspek :

1. Sebagai wadah dari sekelompok manusia yang saling bekerja sama.
2. Sebagai proses dari pengelompokan manusia dalam suatu kerja sama.

Adapun struktur organisasi pada PT. Bank Riau Cabang Pembantu Panam sebagai berikut :

a. Pimpinan Cabang

Bertugas untuk memimpin atau membawahi secara keseluruhan divisi-divisi yang ada dan sekaligus penanggung kepada kantor cabang.

Tugas-tugas pokok pimpinan cabang

1. Memberikan pengarahan dan petunjuk kerja kepada staf dan pelaksana nasabah
2. Menyiapkan usaha jangka panjang.
3. membantu, mengelola administrasi daerah.

Wewenang dan tanggung jawab pimpinan cabang

1. Pimpinan cabang bertanggung jawab terhadap direksi.
2. Mewakili bank dalam pihak ketiga berkenaan dengan kantor cabang.
3. Dalam hal pimpinan cabang tidak berada di tempat, maka tanggung jawabnya diambil alih oleh wakil pimpinan cabang

b. Pimpinan Seksi Pemasaran

1. Mencari nasabah dan memasarkan produk atau jasa-jasa bank.
2. Mengelola, menyelesaikan kredit bermasalah dan kredit hapus buku.
3. Memasarkan, membuat aplikasi dan menganalisis permohonan kredit serta membantu rekening nasabah.

Tugas-tugas pokok pimpinan seksi pemasaran

1. Memasarkan produk dan jasa yang dihasilkan oleh bank.
2. Menghimpun dan mengarahkan dana pihak ketiga.
3. Memasarkan kredit kepada calon nasabah.
4. Mengumpulkan data atau dokumen yang diperlukan.
5. Membuat aplikasi kredit secara terperinci dan disampaikan kepada pejabat.

Wewenang dan tanggung jawab pimpinan seksi pemasaran

1. Memimpin bagian pemasaran dalam menjalankan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada pimpinan cabang.
2. Pimpinan cabang seksi pemasaran tidak berada di tempat maka tugas diambil alih oleh pimpinan bagian yang ditunjuk.

c. Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah

1. Mengusahakan agar tercipta mutu pelayanan yang baik bagi nasabah untuk mencapai laba yang optimal.
2. Melakukan pengendalian kas atau likuiditas beserta perangkat pengamannya guna menghindari berbagai resiko pengelolaan kas.

Tugas-tugas pokok pimpinan seksi pelayanan nasabah

1. Memberikan pelayanan produk dan jasa.
2. Mengendalikan aktivitas pelayanan nasabah.

Wewenang dan tanggung jawab pimpinan seksi operasional

Menjalankan tugas dan wewenang kepada kantor cabang utama.

d. Pimpinan Seksi Operasional

1. Mengusahakan agar proses administrasi dapat dilakukan secara aman, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan atau membuat laporan keuangan kantor cabang.
3. Mempedomani ketentuan dan peraturan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Tugas-tugas pokok pimpinan seksi operasional

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran bersama wakil pimpinan cabang.
2. Memelihara dan meningkatkan disiplin pegawai.
3. Membantu pimpinan TSI.

e. Auditor Cabang

1. Membantu direksi dalam usaha terlaksananya internal kontrol intern atau pengawasan.
2. Mempedomani ketentuan dan peraturan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Membantu hasil investasi tahunan atas kesediaan peralatan perabotan kantor.

Tugas-tugas auditor cabang

Membina peningkatan pengetahuan dan keterampilan para pegawai serta melakukan tugas lain yang diberikan atasan.

Wewenang dan tanggung jawab auditor cabang

1. Auditor cabang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada pemimpin divisi pengawasan.
2. Dalam hal auditor cabang tidak ada di tempat maka tugas dan wewenang diambil alih oleh pimpinan divisi pengawasan.

f. Pelaksana

Pelaksana terdiri dari beberapa karyawan yang merupakan bawahan dari pinsi, yang mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan tujuan bagian masing-masing dan bertanggung jawab kepada pinsi. Pelaksana terdiri dari :

1. Pelaksana customer service

Bertugas melayani nasabah dalam memberikan informasi dan lain sebagainya.

2. Pelaksana teller

Yaitu merupakan petugas front office, yang bertugas menerima setoran, penarikan dan perintah bayar yang telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pelaksana kredit

Bertugas menerima permohonan kredit dari pegawai negeri sampai mencairkan kredit tersebut.

4. Pelaksana kredit umum

Yaitu pelaksana yang bertugas menerima kredit selain KAG, seperti kredit kerakyatan, komersil dan lain-lainserta membuat laporan kredit yang disalurkan.

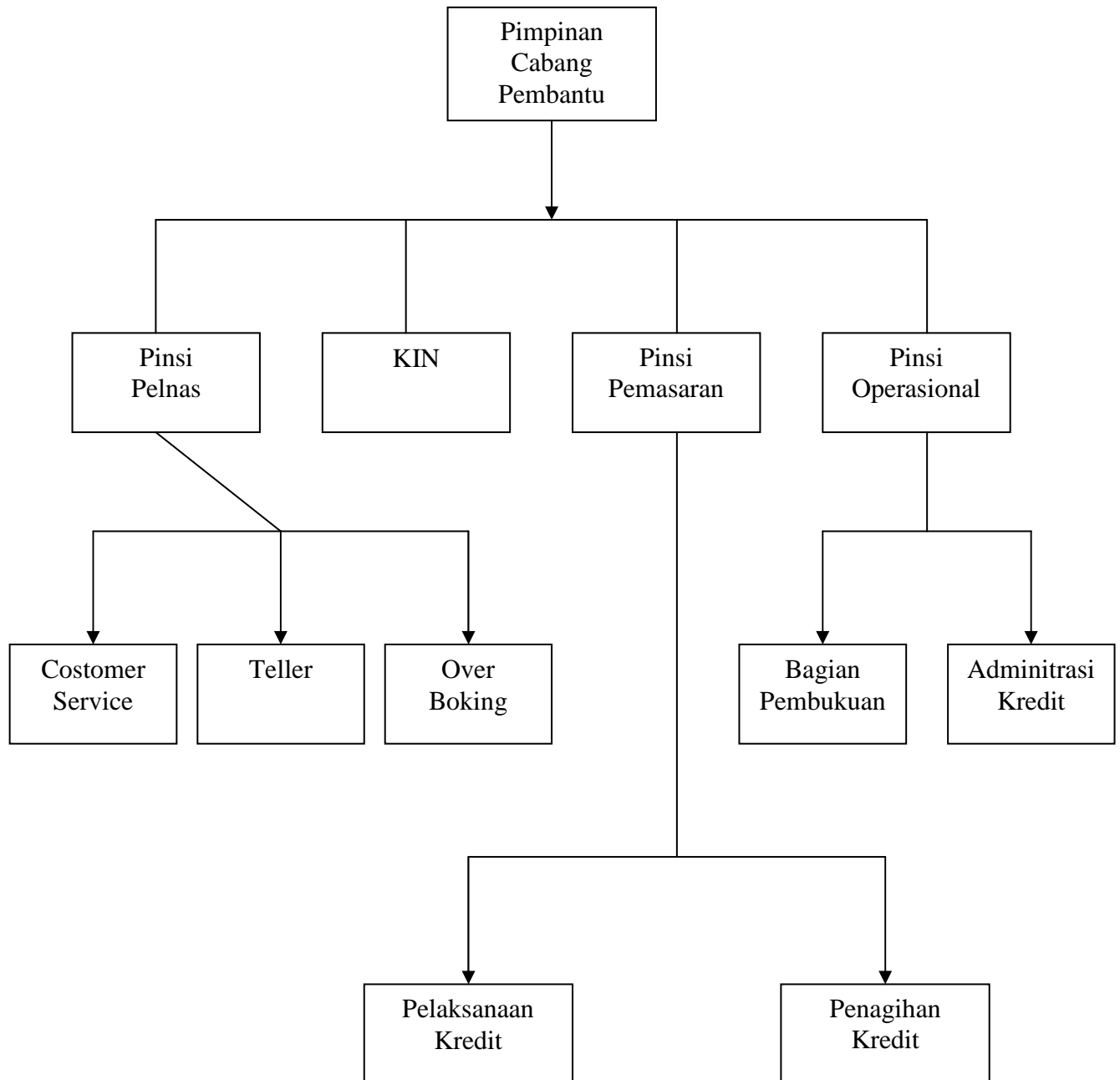
5. Pelaksana pembukuan

Yaitu yang bertugas mengecek transaksi yang terjadi dan membuat laporan dari semua di PT. Bank Riau Cabang Pembantu Panam.

6. Pelaksana transfer

Yaitu bagian yang bertugas memproses kiriman uang dan menerima kiriman yang ditujukan kepada penerima baik melalui kliring dan sebagainya.

Gambar 3.1
Struktur Organisasi PT. Bank Riau Cabang Pembantu Panam



Sumber: PT. Bank Riau Cabang Pembantu Panam.

C. Aktivitas Perusahaan

Bank Riau Cabang Pembantu Panam merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah dibidang keuangan atau perbankan dan menjalankan usahanya sebagai bank umum. Adapun aktivitas usaha Bnk Pembangunan Daerah Riau Cabang Pembantu Panam adalah sebagai berikut :

1. Penghimpun Dana
 - a. Giro
 - b. Deposito
 - c. Tabungan
 - d. Likuiditas
 - e. Dana lainnya
2. Penggunaan Dana
 - a. Penyaluran kredit
 - b. Penempatan pada bank lain
 - c. Penyertaan lainnya
3. Aktivitas atau jasa bank
 - a. Kiriman uang
 - b. Inkaso
 - c. Jaminan bank
 - d. Pembayaran pensiun, PAM, Telephon, listrik, pajak, dan lain-lain

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Sistem

Dalam usaha untuk menciptakan suatu akuntansi yang baik, maka pihak manajemen memerlukan informasi akuntansi yang akurat sehingga dapat memenuhi kebutuhan manajemen dalam mengambil keputusan.

Menurut Mulyadi (2001:2) pengertian sistem pada dasarnya:

“Sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang bersama-sama untuk mengapai suatu tujuan tertentu. Suatu sistem dibuat untuk mencapai tujuan tertentu dan diciptakan untuk menangani suatu hal yang bersama”.

2. Pengertian Akuntansi

Menurut Sadeli dan Siswanto (2000:4) pengertian akuntansi adalah:

a. Ditinjau dari sudut pemakai

Sebagai suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Informasi yang dihasilkan akuntansi diperlukan untuk:

1. Pembuat perencanaan yang efektif pengawasan dan pengambilan keputusan oleh manajemen

2. Pertanggung jawaban kepada investor, kreditur, dan sebagainya.

b. Dari sudut proses kegiatan

Menurut AICPA (*American Institut Of Certified Publik Accountant*) akuntansi adalah seni mencatat, mengelompokan, mengikhtisarkan, menurut cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang, semua transaksi serta kejadian yang sedikit-dikitnya bersifat financial dan dari catatan itu dapat dilakukan analisa dan ditafsirkan hasilnya.

Dari hasil definisi tersebut dapat diambil kesimpulan:

1. Akuntansi diselenggarakan dalam suatu organisasi (biasanya organisasi perusahaan). Informasi akuntansi yang dihasilkan adalah tentang organisasi.
2. Informasi akuntansi sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan perusahaan.

2. Pengertian Sistem Akuntansi

Setelah diuraikan pengertian sistem dan pengertian akuntansi secara umum, maka berikut ini akan diuraikan tentang pengertian sistem akuntansi.

Menurut Mulyadi (2001:3) pengertian sistem akuntansi adalah:

“Organisasi dari formulir-formulir, catatan-catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk informasi yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan”.

1. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*trurh* atau *faith*). Oleh karena dasar dari kata kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa uang, barang, atau jasa.

Kredit juga merupakan kemampuan seseorang atau badan usaha untuk menggunakan uang, barang, atau jasa yang diterimanya dihubungkan dengan kemampuan untuk mengembalikan setelah jangka waktu tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan (2007:13) pengertian kredit adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal dimana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan”

Menurut Hermansyah (2008 : 57) pengertian kredit adalah:

“Pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang di izinkan oleh bank atau badan lain”.s

Menurut Lukman Dendawijaya (2002:82) pengertian kredit adalah:

“ Kredit adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada jangka waktu yang disepakati”.

Sedangkan menurut Thomas Suyatno, dkk yang dikutip dalam buku *money and banking* karangan Raymond P. Kend kredit adalah:

“Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau mkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang”’.

2. Unsur-unsur kredit

Kredit yang diberikan oleh bank yang didasari atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal seperti ini bank baru akan memberi kredit kepada nasabah apabila ia betul-betul yakin bahwa si penerima pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat yang disetujui oleh kedua pihak.

Menurut Thomas Suyatno, dkk (2007:14) unsur-unsur kredit adalah:

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari sipemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
- b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur,ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degre of risk*, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari.

Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, maka masih selalu terdapat unsur ketidak tentuan yang tidak dapat diperhitungkan.

- d. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasrakan kepada uang, maka transaksi-transaksi yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek pengkreditan.

3. Fungsi Kredit

Dalam kehidupan perekonomian modern, bank memegang peranan begitu penting dalam hal pemberian kredit. Organisasi disuatu bank yang mempunyai usaha pokok yaitu memberikan atau menyediakan fasilitas kepada para pengusaha atau masyarakat yang sangat membutuhkan. Kredit yang telah diberikan oleh pihak bank pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan khususnya dibidang perekonomian.

Fungsi kredit dewasa ini pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani masyarakat (*to serve ti society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaiki taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2005 : 88) fungsi kredit adalah :

- a. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.

- b. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
- c. Memperlancar arus barang dan jasa.
- d. Meningkatkan hubungan internasional (L/C, CGI, dan lain-lain).
- e. Meningkatkan produktivitas dana yang ada.
- f. Meningkatkan daya guna (*utility*) barang.
- g. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.
- h. Memperbesar modal kerja perusahaan.
- i. Meningkatkan income per capita (IPC) masyarakat.
- j. Mengubah cara berfikir atau bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

Adapun fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan menurut Budi Untung (2000: 04) adalah :

- 1. Kredit pada hakekatnya utility (daya guna uang)
- 2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, baik peredaran uang giral maupun uang kartal.
- 3. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran suatu barang.
- 4. Kredit merupakan salah satu alat dalam menjaga stabilitas ekonomi, seperti pengendalian inflasi, peningkatan ekspor dan pemenuhan kebutuhan rakyat.
- 5. Kredit dapat mengatasi kurang mampuan para pengusaha dibidang permodalan, sehingga dapat meningkatkan kegairahan dalam berusaha.
- 6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional terutama dibidang ekonomi.

Pada umumnya pemberian kredit oleh pihak Bank Riau cabang pembantu panam mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga hal ini mempengaruhi tingkat kesehatan Bank Riau tersebut. Kredit yang disalurkan tersebut bersumber dari dana masyarakat yang tersimpan pada Bank Riau, maka resiko yang dihadapi pihak Bank Riau dapat dipengaruhi pula. Untuk meningkatkan kesehatan dan daya tahan Bank Riau, pihak Bank Riau diwajibkan membayar resiko dengan mengatur penyaluran kredit maupun fasilitas lain sedemikian rupa, sehingga pemberian kredit tidak hanya terpusat pada debitur atau kelompok-kelompok debitur tertentu.

Dari fungsi-fungsi kredit di atas kita dapat melihat bahwa Bank Riau mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian modern, khususnya dibidang moneter sehingga dapat menunjang pembangunan disegala bidang terutama pada bidang ekonomi.

Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat. Bagi bank yang sehat agar dapat mempertahankan kesehatannya, sedangkan bank yang sakit untuk segera mengobati penyakitnya. Bank indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank yang dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank

tersebut harus dijalankan atau bahkan kalau perlu dihentikan kegiatan operasinya.

Standar untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia. Kepada bank diharuskan membuat laporan baik yang bersifat rutin ataupun secara berkala mengenai seluruh aktivitasnya dalam suatu periode waktu tertentu. Dari laporan ini dipelajari dan dianalisis sehingga dapat diketahui kondisi suatu bank. Dengan diketahui suatu kondisi kesehatannya akan memudahkan bank itu sendiri untuk memperbaiki kesehatannya.

Menurut Kasmir (2006 : 43) aspek-aspek penilaian bank adalah :

1. Aspek permodalan (*capital*)

Dalam aspek ini yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan pada kewajiban penyediaan modal minimum bank . penilaian tersebut didasarkan pada CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang telah ditetapkan bank indonesia.

2. Aspek kualitas aset (*Aset*)

Dalam hal ini upaya dilakukan adalah untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. Penilaian aset harus sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh bank indonesia dengan perbandingan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif.

3. Aspek kualitas manajemen (*Management*)

Untuk menilai kualitas manajemen dapat dari kualitas manusia dalam mengelola bank. Kualitas manusia juga dilihat dari segi pendidikan

serta pengalaman karyawan dalam menangani berbagai kasus yang dihadapi.

4. Aspek earning

Merupakan aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Aspek ini digunakan juga untuk mengukur efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan.

5. Aspek likuiditas (*Liquidity*)

Suatu bank dapat dikatakan liquid, apabila bank bersangkutan mampu membayar semua hutangnya terutama hutang-hutang jangka pendek. Dalam hal ini yang dimaksud yaitu simpanan masyarakat seperti simpanan tabungan, giro, dan deposito.

Disamping dengan penilaian analisis (CAMEL), kesehatan bank juga dipengaruhi hasil penilaian lainnya yaitu penilaian terhadap :

- a. Ketentuan pelaksanaan pemberian kredit usaha kecil (KUK) dan pelaksanaan kredit ekspor.
- b. Pelanggaran terhadap ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) atau sering disebut *legal lending limit*.
- c. Pelanggaran posisi *devisa netto*.

7. Jenis-jenis Kredit

Beragam jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan jenis kredit. Dalam prakteknya kredit yang

adadimasyarakat terdiri dari beberapa jenis. Pembagian jenis iniditunjukkan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu.

Adapun jenis atau macam kredit yang sering kita temukan dewasa ini menurut Kasmir (2004 : 76) jenis-jenis kredit adalah :

1. Dilihat dari segi kegunaan
 - a. Kredit investasi
 - b. Kredit modal kerja
2. Dilihat dari segi tujuan kredit
 - a. Kredit produktif
 - b. Kredit konsumtif
 - c. Kredit perdagangan
3. Dilihat dari segi jangka waktu
 - a. Kredit jangka pendek
 - b. Kredit jangka menengah
 - c. Kredit jangka panjang
4. Dilihat dari segi jaminan
 - a. Kredit dengan jaminan
 - b. Kredit tanpa jaminan
5. Dilihat dari sektor usaha
 - a. Kredit pertanian
 - b. Kredit peternakan
 - c. Kredit industry

- d. Kredit pertambangan
- e. Kredit pendidikan

8. Tujuan pemberian kredit

Dalam pembahasan tujuan kredit, kita tidak dapat melepaskan diri dari falsafah yang dianut suatu negara. Di negara-negara liberal tujuan kredit didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut oleh negara bersangkutan, yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat (keuntungan) yang sebesar-besarnya.

Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal (2006 : 6) kredit yaitu :

1. *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh nasabah.
2. *Safety* yaitu keamana dari prestasi atau fasilitas yang diberikan benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Sedangkan menurut Malayu S.P Hasibuan (2005 : 88) tujuan kredit :

- a. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit.
- b. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada.
- c. Melaksanakan kegiatan operasional bank.
- d. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.
- e. Memperlancar lalu lintas pembayaran.
- f. Menambah modal kerja perusahaan.
- g. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

9. Prosedur Pemberian Kredit

Untuk mempermudah calon debitur dalam pengurusan kredit, maka dalam penyaluran kredit kepada nasabah harus melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan, sehingga penanganannya dilakukan secara seragam pada semua debitur, berikut ini dijelaskan sistematika prosedur pemberian kredit menurut Kasmir (2002 : 124) yaitu :

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam bentuk proposal, yang berisikan : latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan, besarnya kredit dan jangka waktu. Melampirkan dokumen-dokumen

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan perlengkapan dan sudah benar, termasuk penyelidikan keabsahan berkas.

3. Wawancara awal

Untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang diinginkan bank.

4. *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau beberapa objek yang dijadikan usaha atau jaminan.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada saat setelah dilakukan on the spot dilapangan.

6. Keputusan kredit

Untuk menentukan apakah kredit akan diterima atau ditolak, jika diterima maka disiapkan administrasi.

7. Penandatanganan aqad kredit perjanjian lainnya

Merupakan kelanjutan aqad kredit, sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani aqad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surt perjanjian yang dianggap perlu.

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah nasabah menandatangani aqad kredit dengan membuka rekening giro atau tabungan bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran atau penarikan dana

Merupakan pencairan atau penyaluran uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai dengan ketentuan dan tujuan kredit.

Dalam pemberian kredit kepada nasabah, bank selalu dihadapkan kepada resiko kredit. Untuk memperkecil resiko kredit yang mungkin terjadi dan tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak, maka permohonan kredit harus dinilai oleh bank atas dasar-dasar teknis yang dikenal dengan 5 C.

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5 C menurut Kasmir (2004 : 91) yaitu :

1. *Character*

Pengertian character adalah sifat atau watak seseorang, dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

2. *Capacity (capability)*

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuannya.

3. *Capital*

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri. Dengan kata lain capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang dibiayai oleh bank.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan, jaminan juga harus teliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan

dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

5. *Condition*

Dalam menilai hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalau pun jadi diberikan, sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut dimasayang akan datang.

Sementara itu menurut Malayu S.P Hasibuan (2005 : 107) disamping dasar-dasar teknis yang dikenal dengan 5 C ada pula pedoman 7 P dalam penilaian kredit oleh pihak bank, yaitu :

a. *Personality* (kepribadian)

Adalah sifat dan prilaku yang dimiliki calon debitur yang mengajukan kredit bersangkutan, sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit.

b. *Party*

Mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi-klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal,karakter dan loyalitas. Dimana setiap klasifikasi nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

c. *Purpose* (tujuan)

Adalah tujuan dan penggunaan kredit oleh debitur apakah untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja. Tujuan kredit ini menjadi hal yang menentukan apakah permohonan calon debitur diterima atau ditolak.

d. *Prospect*

Adalah prospek perusahaan dimasa yang akan datang, apakah akan menguntungkan (baik) atau merugikan (jelek). Jika prospek terlihat baik maka kredit dapat diberikan, sebaiknya jika jelek kredit ditolak.

e. *Payment* (pembayaran)

Adalah mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredityang diberikan. Hal ini dapat diketahui jika analisis kredit memperhitungkan kelancaran penjualan dan kelancaran calon debitur.

f. *Profitability*

Adalah untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah mendapatkan laba. Profitability diukur per periode, apakah konstan atau meningkat dengan berjalan lancar.

g. *Protection*

Bertujuan agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, jaminan orang, atau jaminan asuransi.

10. Pengertian sistem pengendalian intern

Dewasa ini, para ahli ekonomi telah banyak mengemukakan pengertian tentang sistem pengendalian intern yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya, namun definisi-definisi tersebut pada dasarnya memberikan dasar-dasar yang sama. Sistem pengendalian intern sangat diperlukan untuk menjaga arah dan memaksimalkan kegiatan sesuai dengan tujuan yang dicapai. Seperti yang dikemukakan Mulyadi (2001 : 163) yang memberikan pengertian pengendalian intern sebagai berikut :

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Dari definisi di atas dapat kita lihat bahwa setiap sistem akuntansi yang dirancang tidak dapat dipisahkan dari sistem pengendalian intern. Dengan demikian, sistem pengendalian intern secara keseluruhan bertujuan untuk mengendalikan intern perusahaan, baik kekayaan organisasi, data-data yang dikeluarkan dan pelaksanaan kebijakan manajemen. Sistem pengendalian intern ini menekankan pada tujuan yang hendak dicapai, bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut.

Mutu karyawan merupakan salah satu unsur pengendalian intern yang tidak kalah penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang bermutu tinggi, kompeten dan jujur, maka unsur pengendalian intern yang

lain dapat diminimalisir dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggung jawaban keuangan yang dapat diandalkan.

11. Pandangan Islam Tentang Kredit

Kredit adalah seseorang memberi kepercayaan kepada orang lain, percaya bahwa penerima kepercayaan dimasa akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan, baik uang maupun barang.

Dalam hukum Islam yang merupakan pemberian kredit yaitu ariyah atau pinjam meminjam.

1. Ariyah (Pinjam meminjam)

Pengertian ariyah adalah masalah pinjam meminjam, yakni memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya, dengan tidak merusakkan zatnya agar dapat dikembalikan zat barang tersebut. Segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya boleh dipinjamkan. Hukumnya sunnah, karena menolong sesama saudara yang sedang tertimpa kesusahan. (**Muhammad Nur Ali:2004:28-29**).

Syarat-Syarat Kredit

Syarat-syarat kredit ini diambil dari depag RI tahun 2000

1. Jujur, dengan atas dasar surat Al Baqarah ayat 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مَآثِرَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya : *”Jika sebagian kamu mempercayai yang lain, maka hendaklah yang dipercayai menggunakan amanatnya (Hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada tuhanya”* (Depag RI,2007:71)

Orang yang jujur yaitu yang dapat dipercayai, kejujurannya adalah hal yang sangat penting. Bila pelaku ekonomi dapat dipercayai maka pihak koperasi akan memberi fasilitas-fasilitas dengan kemudahan-kemudahan. Dimana bila koperasi memberikan amanat kepada nasabah berupa pinjaman, maka pelaku ekonomi harus memegang amanah tersebut.

2. Tepat waktu, surat Al-maidah ayat 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : *Hia orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu,”*
(Depag RI,2000:6)

Dalam perekonomian khususnya pada sektor pengkoprasian tepat waktu sangat diperhatikan, dimana nasabah maupun pihak koperasi dituntut untuk memanfaatkan waktu seefisien mungkin dalam mengembangkan usahanya. Dengan tepat waktu diharapkan akan menghasilkan keuntungan sesuai batas waktu dalam kesepakatan.

B. Tinjauan Praktek

1. Jenis Kredit

Bank Riau cabang pembantu Panam sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai tugas pokok untuk mengembangkan perekonomian daerah dengan membantu penyediaan sumber pembiayaan bagi usaha-usaha dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Seiring perkembangan bisnis perusahaan, maka Bank Riau melakukan Redefinisi strategi bisnis menjadi: pengembangan struktur organisasi yang probisnis dan penerapan konsep Strategic Business Unit (SBU) yang dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan dan peningkatan market share.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Bank Riau Cabang Pembantu Panam menyalurkan dana dalam bentuk pemberian kredit. Adapun jenis kredit yang ada pada Bank Riau Cabang Pembantu Panam adalah :

A. Kredit mikro, kecil dan menengah

- a. Usaha mikro, yaitu usaha produktif milik warga negara indonesia yang memiliki hasil penjualan maksimal Rp 100.000.000,. (seratus juta rupiah) pertahun
- b. Usaha kecil, yaitu usaha produktif milik warga negara indonesia yang berbentuk usaha orang perorangan atau kelompok badan

usaha yang tidak berbadan hukum, atau usaha berbadan hukum termasuk koperasi.

- c. Usaha menengah, yaitu kegiatan ekonomi rakyat memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, lebih besar dari Rp 200.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp 10 Miliar.

- d. Jumlah kredit

Jumlah kredit untuk setiap nasabah adalah sebesar keuntungan dana yang diperlukan.

- e. Jangka waktu

Jangka waktu pinjaman untuk usaha mikro dan kecil maksimal 4 tahun.

- f. Jaminan kredit

Jaminan yang diberikan dalam mengajukan kredit tergantung dari besarnya plafon kredit yang diberikan

- h. Suku bunga

Suku bunga berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh bank. Bunga dihitung berdasarkan besarnya maksimum kredit dan dibebankan sepanjang jangka waktu kredit dibayarkan setiap bulan.

- i. Provisi dan biaya Administrasi

Kredit pengusaha kecil, kredit pengusaha mikro dan kredit tanpa agunan, dipungut provisi dan biaya Administrasi yang menjadi tanggungan debitur, dengan ketentuan sebagai berikut:

Provisi 1% dari plafon, minimal Rp 50.000.- dan biaya Administrasi kreta dan KPM Rp 50.000.- , KPK Rp 100.000.- .

B. Kredit komersil

Kredit komersil diberikan kepada debitur untuk memenuhi kebutuhan usahanya. Untuk lebih menumbuhkan perekonomian daerah, Bank Riau menyiapkan beragam produk kredit komersil untuk menunjang kinerja para pebisnis dalam rangka mengembangkan usahanya, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Jumlah kredit

Jumlah kredit untuk setiap nasabah adalah sebesar keuntungan dana yang diperlukan .

b. Suku bunga

Suku bunga berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh bank. Bunga dihitung berdasarkan besarnya maksimum kredit semula dan dibebankan sepanjang jangka waktu kredit. Angsuran pokok dan bunga kredit dibayar setiap bulan.

c. Jangka waktu kredit

Jangka waktu kredit umumnya 1 sampai 3 tahun.

d. Jaminan

Jaminan yang diberikan oleh debitur adalah berupa benda yang tidak bergerak. Nilai barang jaminan tersebut harus 125% dari plaon kredit.

e. Provisian

Provisi yang dikenakan kepada debitur adalah 1% dari plafon kredit dan dibayar tunai oleh debitur pada awal kreditnya dicairkan.

f. Jenis-jenis kredit komersil

1. Kredit Agribisnis
2. Kredit Bina Prima atau Investasi
3. Kredit Niaga Prima atau Modal kerja
4. Kredit Modal kerja atas dasar kontrak atau Karya Prima
5. Kredit Kebun Kelapa Sawit
6. Kredit Modal Kerja kepada Developer

C. Kredit Konsumer

Kredit konsumer merupakan kredit yang diberikan oleh bank yang sifatnya untuk keperluan konsumsi, seperti pembelian rumah dan kendaraan. Kredit konsumer ini mempunyai ketentuan yaitu:

a. Suku Bunga

Pada kredit konsumer ini ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

b. Jangka waktu kredit

Jangka waktu kredit yang berlaku pada kredit konsumtif ini adalah maksimum 5 tahun

c. Jaminan

Jaminan yang diberikan pada kredit konsumtif biasanya berupa benda yang tidak bergerak. Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank harus berkisar 125% dari nilai plafon kredit yang diberikan.

d. Jenis-jenis kredit konsumen

1. Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
2. Kredit Aneka Guna (KAG)
3. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)
4. Kredi karyawan Bank Riau

2. Prosedur Pemberian Kredit

Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat Bank Riau Cabang Pembantu Panam untuk calon debitur antara lain :

- a. Calon debitur harus mengajukan permohonan kredit, dengan dilampiri berkas-berkas sebagai berikut :
 1. Identitas diri dan identitas badan usaha yakni, photo copy KTP, photo copy KK, pas photo, dan surat keterangan usaha.
 2. Agunan dan jaminan kredit berupa SKT atau sertifikat dan BPKB kendaraan.
 3. Besarnya kredit dan jangka waktu serta maksud dan tujuan permohonan kredit yang diinginkan dan jangka waktu kreditnya.
- b. Permohonan kredit harus dilakukan berdasarkan memorandum credit committee yang sudah disetujui dan ditanda tangani oleh anggota

credit committee dan dilegalisir oleh credit support. Informasi minimal yang diberikan oleh memorandum committee antara lain :

1. Identitas nasabah
 2. Plafon pinjaman
 3. Jatuh tempo pinjaman
 4. Suku bunga pinjaman
 5. Perikatan pinjaman
- c. Bagian kredit melakukan peninjauan dan pemeriksaan langsung kelapangan (*on the spot*) dengan maksud meninjau berbagai objek yang akan dijadikan jaminan. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan persyaratan yang telah dilengkapi dalam permohonan kredit ,apakah sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- d. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan dengan seksama, maka dapat ditentukan apakah permohonan kredit tersebut layak diteruskan atau tidak. Apabila kredit ditolak maka akan dibuatkan surat penolakan, dan apabila disetujui maka dibuatkan surat persetujuan pemberian kredit (SPPK). Untuk selanjutnya apabila debitur menyetujui pinjaman dengan ketentuan dan persyaratan yang telah diberikan oleh Bank Riau Cabang Pembantu Panam, SPPK tersebut ditanda tangani oleh debitur di atas matarai.
- e. Atas dasar SPPK tersebut maka dilakukan aqad kerdit.

3. Faktor-Faktor Yang Perlu Dipertimbangkan Dalam Pemberian Kredit

Sebelum fasilitas kredit diberikan kepada calon debitur, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh Bank Riau untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan, maka bank harus melakukan penilaian terhadap analisis 5C.

1. Analisa 5C

a) *Character* (Watak atau kepribadian)

Penilaian pada calon debitur perlu diteliti oleh PT. Bank Riau sebelum kredit tersebut layak diberikan pada calon debitur tersebut Untuk menilai character ini memang sulit, karna setup manusia mempunyai watak yang berbeda-beda. Kreditur (pihak pemberi utang) dapat meneliti apakah calon debitur termasuk ke dalam daftar orang, yang tidak baik atau baik. Oleh karena itu para pengelola kredit Bank Riau harus juga mempunyai ketarampilan psikologis praktis untuk dapat mengenali watak dari calon debiturnya.

Adapun cara yang harus dilakukan oleh PT. Bank Riau untuk mengetahui gambaran tentang character dari calon debitur, diantaranya adalah.

- 1) Meneliti Biodata Calon Debitur
- 2) Mencari Informasi Melalui Tetangga Tempat Tinggalnya
- 3) Meminta informasi kepada karyawan atau tempat calon debitur bekerja
- 4) Meneliti ketekunan dan bertanggung jawab penuh terhadap pekedanaannya
- 5) Meneliti kegiatan calon debitur apakah dia suka ke tempat perjudian atau berpoya-poya.
- 6) Meminta informasi pada Bank Sentral

Setelah mendapatkan data-data tersebut seorang analis kredit dapat menyimpulkan bagaimana watak kepribadian dari calon debitur yang mengajukan permohonan kredit tersebut.

Bank Riau Cabang Pembantu Panam saat ini belum memiliki kriteria penilaian terhadap watak atau karakter calon debitur secara spesifik. Namun untuk memberikan penilaian layak atau tidaknya calon debitur memperoleh kesempatan meminjam uang. PT. Bank Riau memberikan penilaian yang standar setelah dilakukan penelitian dari lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja dan lain-lain, maka hasil penelitian tersebut kreditur sudah dapat memberikan penilaian, bila memenuhi syarat maka debitur dinyatakan Baik atau Layak namun bila dinyatakan tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan maka debitur tersebut tidak memiliki kesempatan untuk meminjam kredit pada PT. Bank Riau Cabang

Pembantu Panam

Dalam hal ini PT. Bank Riau belum bisa langsung memberikan kredit karena harus menilai dari sisi kemampuan (*capacity*) dari calon debitur tersebut, berikut penjelasan mengenai kemampuan yang harus dimiliki oleh calon debitur.

b) *Capacity* (kemampuan)

Dalam hal ini PT. Bank Riau harus mampu menganalisis calon debiturnya melalui kemampuannya dalam memimpin perusahaan dengan baik dan benar, kalau mampu memimpin perusahaannya, ia akan dapat membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian dan tepat waktu.

Pengukuran *capacity* dari calon debitur yang dilakukan oleh Bank Riau Cabang Pembantu Panam dengan melakukan pendekatan sebagai berikut:

- 1) Meneliti *history* perusahaan yang dimiliki oleh calon debitur
- 2) Menilai apakah usaha calon debitur selalu menunjukkan kegagalan dari waktu-kewaktu.
- 3) Menilai pengalaman perusahaan dilihat dari kemampuan selama beroperasi, serta melihat umur usahanya bila belum mencapai 2 tahun, maka bank berhak untuk tidak memberikan pinjaman.
- 4) Melihat sumber daya apakah sudah dipergunakan secara maksimal.
- 5) Bagaimana persaingan antar perusahaan dengan yang lainnya

serta berapa banyak calon debitur tersebut memiliki pangsa pasar yang besar

6) Meneliti hasil penjualan atau omset dari tahun ketahun.

Setelah menilai dari kemampuan yang dimiliki oleh calon debitur maka Bank Riau berhak mengambil kesimpulan apakah calon debitur tersebut berhak mendapatkan fasilitas kredit atau tidak, baik itu dilihat dari histori perusahaan, kemampuan selama beroperasi, omset penjualan dan masih banyak lagi. Bila sudah memenuhi syarat PT. Bank Riau Cabang Pembantu Panam harus melihat pada segi penilaian yang lain, yakni ketersediaan dana yang dimiliki oleh calon debitur tersebut.

Berikut penjelasan mengenai modal (*capital*) yang dimiliki oleh calon debitur yang harus diteliti oleh karyawan PT. Bank Riau.

c) *Capital (modal)*

Selain melihat pada karakter, capacity, PT. Bank Riau juga harus melihat dari segi *capital* (modal) Dengan melihat banyaknya modal yang dimiliki calon debitur atau melihat berapa banyak modal yang ditanamkan calon debitur dalam usahanya, maka pihak Bank Riau dapat menilai modal calon debitur tersebut. Semakin banyak modal yang ditanamkan, calon debitur akan dipandang semakin serius dalam menjalankan usahanya.

Sebelum adanya transaksi kredit antara calon debitur dengan pihak bank sebaiknya PT. Bank Riau harus memperhatikan hal

sebagai berikut:

- 1) Menilai posisi neraca dan laporan perhitungan laba atau rugi untuk beberapa periode terakhir yaitu untuk mengetahui beberapa besarnya solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas usahanya serta tingkat resiko usahanya, serta apakah laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh seorang akuntan publik yang handal.
- 2) Menilai pos-pos lain yang dianggap perlu dianalisa sesuai dengan kondisi bisnis yang sedang berjalan.
- 3) Perhitungan laba rugi setelah perusahaan mendapatkan kredit.
- 4) Serta dilihat berjalankan usaha yang akan dibiayai nantinya dan dengan kelancaran usahanya tersebut calon debitur mampu mengembalikan kredit yang telah disalurkan.

PT. Bank Riau Cabang Pembantu Panam dalam memberikan penilaian terhadap calon debitur sangat relatif, sebab memang ini merupakan salah satu kelemahannya belum memiliki standarnisasi yang akurat. Namun setelah seorang analis menganalisa modal (*capital*) yang dimiliki baik itu dari laporan neraca, laba rugi, pos-pos yang harus dilunasi (pinjaman dari pihak atau bank lain), jika semuanya sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Riau dan calon debitur tersebut memiliki modal/capital yang boleh dinilai memadai atau mampu melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan pihak

bank, maka dari itu PT. Bank Riau harus melihat dari sisi *condition of economy*.

d) *Condition Of Economy*

Dalam hal ini yang dimaksud dengan kondisi ekonomi adalah kondisi atau situasi politik, sosial ekonomi, budaya dan lain-lain yang dapat mempengaruhi perekonomian pada saat tertentu yang akan mempengaruhi kelancaran usaha dari calon debitur yang memperoleh pinjaman kredit, oleh sebab itu PT. Bank Riau harus berhati-hati dalam menilai kondisi perekonomian calon debitur tersebut, karena yang namanya kondisi perekonomian seseorang itu berbeda-beda. Oleh sebab itu Bank Riau tidak memiliki standarisasi secara khusus dalam menilai *condition of economy*, Bank Riau melakukan standarisasi secara umum, dengan melihat kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah setempat dan peraturan dari Bank Riau sendiri. Ada baiknya Bank Riau meneliti aspek kondisi ekonomi dari:

- 1) Daya beli masyarakat
- 2) Luas pangsa pasarnya
- 3) Persaingan
- 4) Perkembangan teknologi
- 5) Ketersediaan terhadap bahan baku.

e) *Collateral*(Jaminan atau agunan)

Setelah menilai dari keseluruhan aspek di atas sebelum PT.

Bank Riau Cabang Pembantu Panam menyalurkan dana tersebut ada baiknya Bank Riau memperhatikan aspek *collateral* (jaminan) karena aspek ini merupakan salah satu aspek yang sangat terpenting yang harus Bank Riau nilai, sebab bila debitur ada kecurangan dalam pembayaran atau tidak mampu melunasi hutang-hutangnya Bank Riau berhak menyita jaminannya tersebut.

Jaminan merupakan syarat utama yang menentukan disetujui atau ditolaknya permohonan kredit nasabah. Menurut ketentuan Bank Indonesia bahwa setiap kredit yang disalurkan oleh suatu bank harus mempunyai agunan yang cukup. Oleh karena itu jika terjadi kredit macet maka jaminan inilah yang digunakan untuk membayar kredit tersebut. Adapun penilaian yang harus dilakukan oleh PT. Bank Riau dalam menilai agunan dari calon debitur sebagai berikut:

- 1) Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan, sebab dari kredit yang disalurkan tadi akan menimbulkan bunga berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati.
- 2) Jaminan harus diteliti keabsahannya, sehingga bila terjadi masalah, maka Bank Riau bisa mempergunakannya secepat mungkin.
- 3) Jaminan harus berupa barang atau surat berharga yang mempunyai nilai nyata.
- 4) Jaminan merupakan penjaminan dari calon debitur karena bank akan menyita jaminan jika terjadi kredit macet.

Setelah semua aspek-aspek di atas ditelusuri maka PT. Bank Riau Cabang Pembantu Panam sudah dapat menyimpulkan apakah calon debitur tersebut berhak mendapatkan kepercayaan untuk menikmati fasilitas kredit atau tidak. Berdasarkan penilaian Bank Riau hanya memiliki penilaian atas Baik atau Buruk, Layak atau Tidak Layak.

Berikut ini adalah data jumlah anggaran kredit pengusaha kecil dan realisasinya pada PT. Bank Riau Cabang Pembantu Panam tahun 2002 s/d 2006 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Daftar Anggaran Kredit Pengusaha Kecil dan Jumlah Kredit yang direalisasikan oleh PT. Bank Riau Cabang Pembantu Panam

Tahun	Dana Kredit untuk Pengusaha Kecil		
	Anggaran KPK	Realisasi KPK	Persentase (%)
2002	170.716.000,-	128.223.000,-	75,1 %
2003	178.826.000,-	186.374.000,-	104,2 %
2004	292.590.000,-	248.496.000,-	84,9 %
2005	573.583.000,-	382.546.000,-	71,2 %
2006	895.935.000,-	826.562.000,-	92,0 %
Jumlah	2.075.650.000,-	1.772.201.000,-	85,4%

Sumber : PT. Bank Riau Cabang Utama

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2002 anggaran kredit sebesar Rp.170.716.000 sedangkan yang tersalurkan hanya 128.223.000 atau hanya 75,1%, dilihat dari anggaran kredit dan yang tersalurkan maka pada tahun. 2002 kredit yang tersalurkan belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan ini disebabkan calon debitur kurang mampu untuk mengelolah usaha, sehingga modal yang ada hanya terbatas sehingga pihak perbankan

tidak bersedia membiayai sektor usaha yang dilakukan oleh calon debitur tersebut sehingga pada tahun 2002 ini tidak mencapai target yang semestinya. Dan pada tahun 2003 anggaran kredit sebesar 178.826.000. sedangkan yang tersalurkan melebihi anggaran yang telah dikeluarkan oleh Bank Riau yakni sebesar 186,374,000 atau 104.2% hal ini terjadi karena banyaknya calon debitur yang mengajukan kredit untuk mengembangkan dan membuka usaha seperti rumah sakit, kebun karet dan lain sebagainya dimana calon debitur pada saat itu juga memiliki modal atau capital yang memadai sehingga Bank Riau bersedia membiayai dan bekerjasama dengan calon debitur. Pada tahun 2004 penyaluran kredit mengalami penurunan dimana anggaran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Riau sebesar 292.590.000 dan yang tersalurkan hanya 248.496.000 atau 84,9 %, disini banyak calon debitur baru mencoba melakukan pinjaman pada Bank Riau untuk membiayai pembukaan usaha baru, sementara dari prinsip atau tahapan yang harus dijalani oleh calon debitur tidak hanya pada modal mereka mengalami hambatan ketika masih adanya hutang pada Bank lain, Surat Kelayakan Bisnis yang tidak ada, sehingga Bank Riau tidak bisa memberikan fasilitas kredit tersebut pada calon debitur.

Sementara pada tahun 2005 anggaran yang dikeluarkan oleh Bank Riau sebesar 537,583,000 dan yang terealisasi 382,546,000 atau 71,2% dalam hal ini realisasi kredit tersebut terus mengalami

penurunan, semua ini terjadi sama saja pada tahun sebelumnya namun pada tahun ini adanya keinginan calon debitur membuka usaha baru bukan hanya karet, namun sudah bergerak pada sektor kelapa sawit, begitu juga pada tahun 2006 masih berhubungan dengan kelapa sawit, namun pada tahun ini terjadi peningkatan terlihat pada persentase yang dihasilkan yakni 92,0% dengan dana yang tersalurkan sebesar 826,562,000 sedangkan anggaran yang disediakan, oleh Bank Riau sebesar 895,935,000. disini Bank Riau mulai kembali memberikan fasilitas dana dan bekerjasama dengan para pengusaha kelapa sawit, sebab Bank Riau menilai bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan sektor produktif untuk dibiayai dan mereka memiliki modal/capital yang cukup untuk mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga yang timbul akibat pinjaman tersebut tepat pada waktunya serta persyaratan yang lengkap untuk diberikan fasilitas kredit. Dari penjelasan di atas Artinya penyaluran kredit pada PT. Bank Riau tidak mencapai target disebabkan factor Capital atau modal dan kelengkapan Surat Kelayakan Bisnis yang belum memadai dalam suatu usaha tersebut, kerana dalam penyaluran kredit factor capital dan surat kelayakan bisnis penting bagi bank kerana dari segi inilah perbankan bisa menilai dan meramalkan apakah kredit tersebut sanggup dilunasi oleh calon debitur atau tidak.

4. Pencatatan Akuntansi Pemberian Kredit

Proses pencatatan akuntansi sangat penting dalam setiap penyaluran kredit, yang dirancang untuk mencatat terjadinya transaksi aktivitas kredit dalam melaksanakan aktivitasnya, masing-masing lembaga keuangan mempunyai sistem pencatatan akuntansi perkreditan dan pembebanan bunga yang berbeda-beda. Pada Bank Riau cabang Pembantu Panam berdasarkan kredit menurut cara penarikan dan pembayaran kembali, maka sistem akuntansi pemberian kredit yang digunakan adalah Non R/C (Non Rekening), maksudnya :

- a. Realisasi kredit langsung diambil seluruhnya sekaligus.
- b. Setiap pembayaran angsuran oleh debitur, langsung mengurangi baki debetnya.
- c. Bunga dihitung dari maksimal realisasi kredit.

Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pemberian kredit ini adalah :

- a. Fungsi kredit bertugas dan bertanggung jawab untuk meneliti status kredit yang telah diberikan kepada debitur.
- b. Fungsi penagihan bertugas dan bertanggung jawab untuk membuat surat atau bukti pembayaran setoran atau tagihan secara periodik dari debitur.
- c. Fungsi akuntansi bertugas dan bertanggung jawab untuk mencatat berkurangnya kewajiban debitur dan membukukan jurnalnya.

Catatan-catatan akuntansi yang digunakan adalah :

- Jurnal pencairan atau realisasi kredit
- Jurnal angsuran kredit (kredit pokok dan bunga)
- Jurnal pelunasan kredit

Dalam pemberian kreditnya, metode pembebanan suku bunga yang digunakan adalah *flate rate*. Besarnya pembebanan suku bunga tiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya dan demikian pula dari pokok pinjaman setiap bulan dibayar dengan jumlah yang sama, sehingga angsuran tiap bulannya sama sampai kredit tersebut lunas.

Contoh kasus :

Tuan Masmur telah memperoleh fasilitas kredit dari Bank Riau Cabang Pembantu Panam dengan plafon kredit senilai Rp 50.000.000.- dengan jangka waktu 12 bulan (1 tahun), bunga yang dibebankan terhadap nasabah 12% setahun. Debitur dibebankan biaya administrasi sebesar 1% dan provisi sebesar 1% dari plafon minimal Rp 50.000.- .

Berdasarkan perhitungan di atas maka debitur melakukan pembayaran pokok pinjaman setiap bulannya adalah sebesar Rp. 1.700.000.- . maka jurnal yang dibuat oleh pihak Bank Riau adalah :

Tuan Masmur Rp. 1.700.000.-

Penerimaan pokok pinjaman	Rp. 1.700.000.-
---------------------------	-----------------

Perhitungan bunga setiap bulannya adalah :

$$\begin{aligned} \text{Bunga} &= \frac{\text{bunga x nominal pinjaman}}{\text{Jangka waktu}} \\ &= \frac{12\% \times \text{Rp. } 50.000.000,-}{12 \text{ bulan}} \end{aligned}$$

$$= \frac{\text{Rp. 6.000.000,-}}{12}$$

$$= \text{Rp. 500.000,- per bulan}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut maka Tuan Masmur melakukan pembayaran bunga pokok pinjaman kepada pihak Bank Riau adalah sebesar Rp. 500.000,- setiap bulannya. Dan jurnal saat akhir bulan yang dibuat oleh Bank Riau untuk membukukan bunga adalah :

Tuan Masmur	Rp. 500.000.-
-------------	---------------

Penerimaan bunga pinjaman	Rp. 500.000.-
---------------------------	---------------

Maka Tuan Masmur melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya dicatat oleh bank adalah :

Kas	Rp. 2.760.000.-
-----	-----------------

Pokok pinjaman	Rp. 1.700.000.-
----------------	-----------------

Pendapatan bunga	Rp. 500.000.-
------------------	---------------

Jadi jumlah angsuran yang dibayar setiap bulannya oleh debitur kepada pihak Bank Riau sampai pelunasan adalah senilai Rp. 2. 760.000.-.Setelah debitur melakukan pelunasan terhadap kreditnya maka pihak Bank Riau mencatat dengan jurnal :

Kas	Rp. XXX
-----	---------

Rekening debitur	Rp. XXX
------------------	---------

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis pada PT Bank Riau Cabang Pembantu Panam maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. PT. Bank Riau Cabang Pembantu Panam dalam menyalurkan kredit kepada calon debiturnya harus memperhatikan prinsip 5 C tersebut sebab dengan meneliti terlebih dahulu dari prinsip 5C tadi maka Bank Riau akan dapat mengetahui siapa dan bagaimana sifat dari calon debiturnya, bagaimana kemampuannya untuk melunasi kewajiban-kewajibannya serta bentuk jaminan yang diserahkan harus sesuai dengan berapa jumlah kredit yang dipinjam oleh debitur kepada bank.
2. Dari prinsip 5 C yang telah dilakukan penelitian, dapat diketahui bahwa dalam hal ini Bank Riau belum menetapkan standarisasi untuk menilai calon debiturnya secara tepat, namun untuk penilaian terhadap prinsip Collateral dalam hal ini Bank Riau telah menetapkan standarisasi yang bisa dibilang bagus atau tetap, sedangkan untuk prinsip *Character*, *Capacity*, *Capital*, dan *Condition*. Bank Riau memakai standarisasi secara umum belum memiliki spesifikasi semestinya, namun faktor yang menjadi tolak ukur berapa besar kredit bisa disalurkan pada calon debitur adalah factor Capital atau modal serta Surat Kelayakan Bisnis.

B. Saran

Dari uraian di atas dapatlah kiranya penulis memberikan suatu saran yaitu:

1. Dalam melakukan analisa kredit 5C hendaknya Bank Riau telah memiliki standarisasi yang cermat dan akurat. Karena dengan memiliki standarisasi yang tepat untuk menilai calon debitur maka dalam hal ini setiap calon debitur memiliki kesempatan untuk dapat meminjam uang (kredit) pada PT. Bank Riau Cabang Pembantu Panam penyaluran kredit yang akan diberikan kemasyarakat sangat memiliki resiko yang sangat tinggi, bisa-bisa saja calon debitur yang tersebut menghindar setiap tiba waktu pembayaran oleh karena itu diperlukan standarisasi yang akurat dalam menilai calon debitur.
2. Agar tercapainya penyaluran kredit kepada nasabah Bank Riau hendaknya meningkatkan lagi pelayanan yang membuat nasabah puas dan terkesan atas pelayanan yang mereka rasakan sewaktu berkunjung, ke Bank Riau untuk mengetahui jenis-jenis kredit serta tata cara lainnya dalam prosedur pengajuan kredit, serta dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat supaya tercipta kehidupan yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntansi Indonesia, 1999. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat. Jakarta
- Mulyadi, 2001. *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Salemba Empat. Jakarta
- Kasmir, 2002. *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Grafindo Persada. Jakarta
- Kasmir, 2004. *Manajemen Perbankan*, Pt. Grafindo Persada. Jakarta
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, 2006. *Credit Management Handbook Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir dan Nasabah*, PT. Grafindo Persada,
- Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta
- Suhardjono, 2003. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, UPP AMD YKPN. Yogyakarta
- Suyatno, 2003. *Dasar-dasar Perkreditan*, PT. Gratnedia, Pustaka, Utama, Jakarta.
- Firdaus Rahmat dan Maya Arianti, 2004. *Manajemen Perkreditan Bank Umum, Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasi Lengkap dengan Analisis Kredit*, Alfabeta. Bandung
- Hasibuan, *Malayu S.P*, 2005. *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Untung, Budi, 2000. *Perbankan di Indonesia*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta
- Muhammad Nur Ali, 2004. *Kamus Agama Islam*, Annizan, Cirebon

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1. DAFTAR ANGGARAN KREDIT PENGUSAHA KECIL DAN JUMLAH KREDIT YANG DIREALISASIKAN OLEH PT. BANK RIAU CABANG PEMBANTU PANAM...	48
---	----

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1. STRUKTUR ORGANISASI.....	19
--------------------------------------	----